



RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TA. 2023**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
JL. RAYA HAJIMENA, KEC. NATAR
LAMPUNG SELATAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang mengacu kepada RKPD dan memuat kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh SKPD terkait.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menyusun dan menata rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan merupakan tahapan guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini dibuat, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Hajimena, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

YURNANIS, S. IP., M.Si
Revisi Utama Muda
NIP. 19690710 199003 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renja Terhadap Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu – isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.....	36
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.2. Program Daerah	39
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB IV. PENUTUP	41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan jangka Panjang/RPJP – Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-Daerah dan memperhatikan RPJM-Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah/ RKP Daerah, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/Lembaga atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Keterkaitan antara Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Sedangkan Penjabaran dari RPJM Daerah bagi setiap Perangkat Daerah adalah dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setelah tersusun Renja PD, maka dibuatlah Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang merupakan salah satu dokumen penganggaran, terdiri dari rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada rencana kerja berisikan informasi mengenai input, output dan outcome program dan kegiatan yang akan dicapai tapi belum disepakati dan disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dokumen pelaksana anggaran. Kemudian setelah RKA tersusun, ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang merupakan salah satu dokumen penganggaran untuk acuan pelaksanaan anggaran yang berisikan informasi mengenai input, output program dan kegiatan yang akan di capai dan yang sudah disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dokumen pelaksana anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menyusun dan menata rencana kerja berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan merupakan tahapan guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJP dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD menggambarkan dalam penyusunan RKPD/dokumen perencanaan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran harus menjadi pijakan bagi setiap PD dalam menyusun dokumen RENJA. Program dan kegiatan yang dimuat dalam RENJA harus konsisten dengan isi Renstra, sehingga nantinya tidak akan muncul program atau kegiatan baru diluar Renstra sebagaimana fenomena yang masih banyak terjadi selama ini.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung bermaksud untuk menyempurnakan penyusunan Renja Tahun 2023 menyesuaikan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Lampung dan RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 2019 – 2024 sebagai pedoman penyusunan RKA dan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2023.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2023.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan PD serta pengawasan selama periode 1 (Satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Provinsi Lampung

Perangkat Daerah: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Kode Permendagri	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Renstra Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	12
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG										Realisasi renstra kinerja hasil program dan keluaran s.d tahun 2020 memiliki nama program, kegiatan dan indikator program dan kegiatan yang berbeda dengan tahun 2021, sehingga tidak dapat disandingkan, karena pada tahun 2021 sudah mengikuti permendagri 90 tahun 2019.
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	18	-	18	18	100	18	36	50	
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	8	-	8	8	100	8	16	50	
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah	20	-	20	20	100	20	40	50	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan										
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan SKPD	1	-	1	1	100	1	2	50	
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen bulanan/triwulan /semesteran SKPD	18	-	18	18	100	18	36	50	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										

Kode Permendagri	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Renstra Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	12
5.04.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD	0	-	2	2	100	-	-	100	
5.04.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Asset	3	-	2	2	100	2	2	50	
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah	1	-	-	-	-	1	1	33,33	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
5.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian	9	-	9	9	100	9	18	50	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	105	-	95	95	100	95	190	46,91	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan Listrik	12	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Cetak dan Penggandaan	12	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan buku bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	200	-	-	-	-	100	100	35,21	
5.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12	-	12	12	100	12	24	50	

Kode Permendagri	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Renstra Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	12
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan Makan dan Minum	8	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi	157	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip SKPD	12	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pengadaan Kendaraan Dinas			-	-	-	1	1	50	
5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	1	-	92	92	100	80	172	95,56	
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	-	274	274	100	76	350	66,67	
5.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	-	-	-	1	1	25	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa Pelayanan Umum Kantor	12	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

Kode Permendagri	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	12
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	550	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30	-	12	12	100	12	24	50	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis										
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	780	-	420	417	99,29	1139	1156	44,81	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen LSP	1	-	1	1	100	1	2	50	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ Kota	Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor	400	-	100	100	100	350	450	66,67	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan sumber belajar	4	-	3	3	100	3	6	50	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Kerjasama	3	-	2	2	100	2	4	36,36	

Kode Permendagri	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	12
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1149	-	1.059	1.059	100	1340	2399	38,30	
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	6	-	6	4	66,67	6	10	83,33	

Capaian kinerja keuangan dan fisik program dan kegiatan tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I: Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur

Pada sasaran ini terdiri dari satu program yaitu : **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan 1 (satu) kegiatan pendukung. Capaian realisasi keuangan pada triwulan IV sebesar Rp.8,372,560,397,- atau sebesar 87.12% dari Rp.9,610,382,800,-. Adapun realisasi fisik program tercapai sebesar 95,14%. Rincian capaian realisasi per kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.1,002,517,100,- terealisasi Rp.938,594,447,- atau sebesar 93.62%.
Target keluaran (output) berupa: Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sebanyak 420 orang.
Realisasi keluaran sebanyak 417 orang mengikuti Pengembangan Kompetensi atau sebesar 99,29%, hal ini disebabkan karena tiga orang peserta dari pemerintah kab/kota yang ditugaskan terkena COVID, sehingga tidak dapat mengikuti diklat.
2. Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 43.747.900,- terealisasi Rp. 21,988,900 ,- atau 50.26 %.
Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen LSP sebanyak 1 Dokumen.
Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 1 Dokumen LSP atau sebesar 100%.
 - b) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 183.443.100,- terealisasi Rp.130.479.100, atau 71,13%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor sebanyak 100 orang.

Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 100 orang peserta uji kompetensi atau sebesar 100%.

c) Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 173.073.600,- terealisasi Rp.139,722,700,- atau 80.73%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen Kelembagaan dan sumber belajar sebanyak 3 dokumen, keluaran kegiatan berupa 3 dokumen Kelembagaan dan sumber belajar atau sebesar 100 %.

d) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 15.300.000,- terealisasi Rp.14.300.000,- atau 93,46 %.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen Kerjasama 2 dokumen, keluaran kegiatan sebanyak 2 dokumen Kerjasama atau sebesar 100%.

e) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 8.076.781.100,- terealisasi Rp.7,056,925,350,- atau 87.37%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 1.059 orang, keluaran kegiatan berupa 1.059 orang mengikuti Pengembangan Kompetensi atau 100 %.

f) Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.115.520.000,- terealisasi Rp.70,549,900,- atau 61.07%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Pelaksanaan KPMD, akreditasi dan Karya Ilmiah WI 6 Kali, keluaran kegiatan berupa 4 kali Pelaksanaan KPMD, akreditasi dan Karya Ilmiah WI atau sebesar 66,67%. Capaian kurang dari 100% akibat Adanya covid -19 yang mengalami peningkatan menyebabkan pelaksanaan KPMD/ monitoring dan evaluasi kegiatan diklat di kab/kota terbatas hanya dapat dilakukan pada 4 kab/kota saja.

Sasaran II: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi

Pada sasaran ini terdiri dari satu program yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan** dengan 8 (delapan) kegiatan. Capaian realisasi keuangan s.d triwulan IV sebesar Rp.16,650,499,932,- atau sebesar 96.49% dari Rp. 17,256,310,652,-. Adapun realisasi fisik tercapai sebesar 100%. Rincian capaian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 198.576.000,- terealisasi Rp. 196.795.200,- atau 99.10 %.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 18 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 18 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah atau sebanyak 100%.

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 32.000.000,- terealisasi Rp.31,956,000,- atau 99.86%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 8 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 8 Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD atau sebesar 100%.

- c) **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 20.612.000,-, terealisasi Rp.20,593,000,- atau 99.91%.
Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah sebanyak 20 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 20 dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah atau sebesar 100%.
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:**
- a) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 13.202.590.292,-, terealisasi Rp.12,671,358,163,- atau 95.98%.
Target keluaran (output) berupa: Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 12 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN atau sebesar 100%.
- b) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 30.000.000,-, terealisasi Rp.29,758,000,- atau 99.19%.
Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 1 Dokumen atau sebesar 100%..
- c) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp.19,982,000,- atau sebesar 99.91%.
Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD sebanyak 18 dokumem. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 18 dokumen atau sebesar 100%.
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:**
- a) **Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**
Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi Rp. 12.000.000,- atau sebesar 100%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen RKBMD SKPD sebanyak 2 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: 2 dokumen RKBMD SKPD atau sebesar 100%.

b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 15.670.500,- terealisasi Rp.15,657,100 ,- atau sebesar 99.91%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah Dokumen Pengelolaan Asset sebanyak 2 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: 2 dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD atau sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 32.598.500,- terealisasi Rp.32.598.500,- atau sebesar 100%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian sebanyak 9 dokumen. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 9 Dokumen administrasi kepegawaian atau 100%.

b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 206.143.000,- terealisasi Rp.205,182,814,- atau sebesar 99.53%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi sebanyak 95 orang. Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 95 orang atau sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 42.486.800,- terealisasi Rp.42.486.800,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan penyediaan Peralatan Listrik sebanyak 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan penyediaan Peralatan Listrik atau sebesar 100%.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 58.700.000,- terealisasi Rp.58.700.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor atau sebesar 100%.

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 25.818.600,- terealisasi Rp.25.818.600,- atau 100%. Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan penyediaan Peralatan Rumah Tangga atau sebesar 100%.

d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 37.275.500,- terealisasi Rp.37.275.500,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan penyediaan Cetak dan Penggandaan sebanyak 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan berupa 12 bulan penyediaan Cetak dan Penggandaan atau sebesar 100%.

e) Penyediaan Bahan/Material

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 35.453.000,- terealisasi Rp.35,438,000,- atau 99.96%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan penyediaan bahan/material sebanyak 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan berupa 12 bulan jumlah penyediaan bahan/material atau sebesar 100%.

f) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 35.004.000,- terealisasi Rp.35.004.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan penyediaan Makan dan Minum sebanyak 12 bulan, Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan jumlah penyediaan Makan dan Minum atau sebesar 100%.

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 1.283.298.059,75,- terealisasi Rp.1.270.588.567,- atau 99.01%.

Target keluaran (output) berupa jumlah rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 bulan, realisasi keluaran kegiatan yaitu sebanyak 12 bulan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi atau sebesar 100%.

h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 12.997.600,- terealisasi Rp.12.910.600,- atau 99.33%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan penatausahaan arsip SKPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan penatausahaan arsip SKPD atau sebesar 100%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengadaan Mebel

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 110.770.000,- terealisasi Rp.107.250.000,- atau 96,82%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah unit pengadaan mebeleur sebanyak 92 unit. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 92 unit pengadaan mebeleur atau sebesar 100%.

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.208.686.500,- terealisasi Rp.201.304.000,- atau 96,46%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 274 unit. Realisasi keluaran kegiatan yaitu 274 unit pengadaan Peralatan dan Mesin atau sebesar 100%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.724.312.000,- terealisasi Rp.677,635,485,- atau 93.56%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan yaitu 12 bulan Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik atau sebesar 100%.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 512.284.300,- terealisasi Rp.511,862,100,- atau 99.92%.

Target keluaran (output) berupa Jumlah bulan jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 bulan.

Realisasi keluaran kegiatan sebanyak 12 bulan Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor atau sebesar 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kegiatan sebesar Rp.121.604.000,- terealisasi sebesar Rp. 120,915,503 ,- atau 99.43%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: sebanyak 12 bulan Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau sebesar 100%.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 107.580.000,- terealisasi sebesar Rp.107.580.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: sebanyak 12 bulan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya atau sebesar 100%.

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 169.850.000,- terealisasi sebesar Rp.169.850.000,- atau 100%.

Target keluaran (output) berupa: Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya sebanyak 12 bulan. Realisasi keluaran kegiatan yaitu: sebanyak 12 bulan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya atau sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, mempunyai tugas pokok *"Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Adapun Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;

- d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparaturnya guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung meliputi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dan melaksanakan program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kinerja pelayanan BPSDM Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan menilai indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan merujuk pada indikator-indikator yang tertuang dalam sasaran organisasi dan indikator kinerja sasaran yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur berbasis kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan formulasi perhitungan capaian IKU. Adapun IKU BPSDM Provinsi Lampung, yaitu:

1. Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat
2. Nilai Akreditasi

Selanjutnya Kinerja pelayanan yang dilakukan BPSDM Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA			KET
				TAHUN 2021			
				TARGET	REALISASI	%	
1.	Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat dengan hasil pos test diatas 70 dan predikat memuaskan sampai tahun berjalan dibagi dengan jumlah keseluruhan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dikalikan 100%	25,34	23,49	92,71	Tinggi
		Nilai Akreditasi	Berdasarkan hasil Kualifikasi Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	B	B	100	Sangat Tinggi

2. Sasaran

a. Sasaran 1: Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sasaran meningkatnya pengembangan kompetensi aparatur didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran yaitu: Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Capaian Kinerja			KET
				Tahun 2021			
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat dengan hasil pos test diatas 70 dan predikat memuaskan sampai tahun berjalan dibagi dengan jumlah keseluruhan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dikalikan 100%	25,34	23,49	92,71	Tinggi

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2021 untuk indikator Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat sebesar 25,34%. Target 25,34% tersebut merupakan akumulasi dari capaian kinerja tahun sebelumnya, adapun kinerja indikator sasaran didapat melalui formulasi persentase jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat dengan hasil pos tes di atas 70 dan predikat memuaskan sampai tahun berjalan dibagi dengan jumlah keseluruhan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dikalikan 100%, dimana pada tahun 2021 terdapat penambahan sebanyak 716 orang dari total 2.899 orang aparatur yang telah memiliki sertifikat diklat di tahun 2020 sebelumnya, sehingga total akumulatif s.d tahun 2021 adalah 3.615 orang, sedangkan jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Lampung keseluruhan terdapat 15.387 orang (Sumber: BKD Provinsi Lampung Desember 2021), maka capaian indikator kinerja utama/sasaran strategis adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat dengan hasil pos tes di atas 70 dan predikat memuaskan sampai tahun berjalan}}{\text{Jumlah keseluruhan aparatur pemerintah provinsi Lampung}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3.615}{15.387} \times 100 \% = 23,49\%$$

Nilai tersebut kurang dari target yang ditetapkan yaitu 25,34% atau target baru terealisasi sebesar 92,71%.

Sasaran II: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi didukung oleh 1 (satu) Indikator Sasaran yaitu Nilai Akreditasi

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Capaian Kinerja			KET
				Tahun 2021			
				Target	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	Berdasarkan hasil Kualifikasi Nilai Akreditasi	B	B	100	Sangat Tinggi

Kinerja indikator sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat berupa Nilai Akreditasi. Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil kualifikasi Nilai Akreditasi saat penilaian akreditasi. Target Nilai Akreditasi B pada tahun 2021 ditetapkan berdasarkan hasil pada saat penilaian reakreditasi tahun 2019 yang berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun, untuk itu target indikator yang ditetapkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat adalah Nilai Akreditasi B selama 3 (tiga) tahun s.d tahun 2022, pada tahun 2022 akan dilakukan reakreditasi BPSDM Provinsi Lampung kembali, dan diharapkan Nilai Akreditasi dapat meningkat menjadi A, sehingga pada tahun tersebut target Nilai Akreditasi yang ditetapkan adalah A. Untuk capaian tahun 2021, Nilai Akreditasi telah tercapai B dimana capaian realisasi otomatis sesuai dengan target yaitu B atau sebesar 100%.

BPSDM Provinsi Lampung merencanakan untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi dari B menjadi A pada tahun 2022, untuk itu perlu upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang dilakukan oleh seluruh elemen BPSDM Provinsi Lampung. Akreditasi didapat melalui penilaian fasilitas kediklatan sesuai dengan standar LAN serta pengelola dan penyelenggara diklat yang sudah memenuhi persyaratan yang distandarkan oleh LAN.

2.3 Isu – isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun bersangkutan. Dalam penentuan serta pelaksanaan program dan kegiatan, terjalin koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota. Koordinasi dan sinergi yang dilakukan, selain untuk menjaring usulan program dan kegiatan pada musrenbang RKPD, juga dilakukan kegiatan pembinaan kediklatan, pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kompetensi aparatur, dimana BPSDM Provinsi Lampung melakukan monitoring pelaksanaan diklat dan mensosialisasikan peraturan-peraturan terkini terkait diklat. Disamping itu pada pelaksanaan kegiatan diklat, baik itu diklat teknis dan fungsional, diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan, koordinasi terjalin secara terus-menerus baik dengan kabupaten/kota maupun dengan BPSDM Kemendagri serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina lembaga diklat.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:

1. Anggaran

- a. Ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung belum sebanding dengan jumlah aparatur yang ada, mengingat para ASN mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi setiap tahunnya, sebagaimana telah diatur oleh UU Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada pasal 203 ayat 4 bahwa ASN mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20 jam pelajaran (JP) pertahun;

- b. Adanya refocusing/efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Lampung akibat anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid mengakibatkan beberapa target kegiatan berkurang, selain itu terdapat pembatasan pengambilan dana kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran di kas daerah sehingga terdapat beberapa kegiatan BPSDM Provinsi Lampung yang tidak berjalan sesuai jadwal rencana.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal secara internal, sehingga data kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung belum terkelola dengan baik;
- b. Kinerja Sumber daya manusia BPSDM Provinsi Lampung yang belum optimal dan jumlah yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat efektifitas pencapaian kinerja, selain itu masih kurangnya motivasi kerja dan tingkat kedisiplinan SDM sehingga perlu pembinaan intensif dari atasan.

Adapun solusi pemecahan masalah baik permasalahan anggaran dan program yang sedang dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan skala prioritas kegiatan-kegiatan BPSDM Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan.
2. Terkait rasionalisasi/efisiensi anggaran kedepannya BPSDM Provinsi Lampung mengupayakan agar anggaran untuk kediklatan tidak mengalami rasionalisasi/efisiensi anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan instansi pembina diklat yaitu BPSDM Kemendagri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan terkait baik itu diklat ataupun kegiatan lainnya;
4. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana;

5. Meningkatkan kapasitas SDM BPSDM Provinsi Lampung melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan kursus.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden terpilih 2019-2024, dimana salah satu fokus pembangunan yaitu pengembangan SDM dan mengembangkan ASN yang professional, yang diturunkan pada misi 8: Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai tahun 2019 dan seterusnya menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

Prioritas pembangunan nasional jangka menengah ke 4, tahun 2020-2024, berfokus pada penguatan kualitas SDM, untuk sektor keAparaturan, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Wujud birokrasi berkelas dunia tersebut dicirikan dengan apa yang disebut dengan SMART ASN, yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi: integritas, profesional, hospitality, networking, enterprenership, berwawasan global, dan penguasaan IT dan Bahasa asing.

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik

secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kapasitas SDM dapat dicapai melalui berbagai Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas.

Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM Indonesia. Upaya tersebut tentu saja membutuhkan kerjasama dari semua pihak serta diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan SDM. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Indonesia akan lebih mudah tercapai.

Sejalan dengan pembangunan SDM, Pemerintah juga menetapkan Penyederhanaan birokrasi sebagai program prioritas Kabinet Indonesia Maju menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato saat sidang paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019. Dalam perkembangannya kebijakan tersebut diterapkan pada tataran pemerintahan pusat maupun daerah yang diatur melalui Permenpan 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan di atas tentunya tidak hanya berhenti pada proses peralihan jabatannya saja, namun untuk memperkuat ASN pasca penyetaraan dipandang perlu dilakukan orientasi/bimtek/diklat terhadap jabatan fungsional yang diemban mengingat sebagian besar pejabat fungsional penyetaraan belum mengerti dan memahami tisi jabatan tersebut.

Berangkat dari gambaran di atas, pembangunan SDM menjadi salah satu titik berat prioritas pemerintahan Presiden dan wakil presiden selama 2019-2024 baik dari sektor pemerintahan maupun dunia professional dan sektor penggerak pembangunan. Pembangunan SDM menuju SDM yang professional dan kompeten memerlukan sinergi bersama antara pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam menyediakan SDM profesional. Target pemerintah 2024 Indonesia menuju Birokrasi kelas dunia ASN menjadi tantangan dan peluang sendiri khususnya dalam sisi penyiapan SDM dalam hal ini ASN sebagai SDM pemerintah dimana lembaga diklat dituntut untuk lebih intensif mengembangkan program-program pelatihan yang mendukung percepatan proses pembangunan, adaptasi teknologi dan *link and match* dengan kebijakan/agenda pembangunan baik di pusat maupun daerah. Selain itu pelaksanaan sertifikasi kompetensi menunjukkan tingkat kompeten seseorang dalam menjalankan profesinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja yang dijabarkan dalam Renja tahun 2023 yang berpedoman pada Renstra BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019-2024 serta capaian program prioritas dan agenda/janji kerja Kepala Daerah terpilih. Dalam proses review ranwal RKPD, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun BPSDM Provinsi Lampung tahun 2023 telah sesuai rancangan awal RKPD baik secara pemilihan program/kegiatan maupun pagu indikatif yang ditetapkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tertuang dalam bentuk matrik yang berisi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur dan target sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan setiap program dan kegiatan sebagaimana tabel T-C.31.

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Lampung

Perangkat Daerah: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19,014,483,207	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19,056,427,392	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	155,780,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	155,780,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hajimena	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hajimena	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	100,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	33,280,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	33,280,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hajimena	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	22,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hajimena	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	22,500,000	
	Administrasi Keuangan		Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13,046,050,295	Administrasi Keuangan		Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13,163,750,292	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hajimena	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	12,971,050,292	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hajimena	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	13,088,750,292	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	47,952,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	47,952,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	27,048,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	27,048,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Barang Milik daerah Perangkat Daerah	100%	28,990,500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Barang Milik daerah Perangkat Daerah	100%	28,990,500	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	15,670,500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	15,670,500	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13,320,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13,320,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	280,085,400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	274,732,900	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hajimena	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	52,878,500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Hajimena	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	52,878,500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Hajimena	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 orang	227,206,900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Hajimena	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 orang	227,206,900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peningkatan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3,459,843,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peningkatan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,316,611,600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Hajimena	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36,484,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Hajimena	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36,484,200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hajimena	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	55,175,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hajimena	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	55,175,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hajimena	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10,367,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hajimena	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10,367,600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hajimena	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,354,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hajimena	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,354,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hajimena	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hajimena	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	20,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Hajimena	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	12 Paket	109,775,600	Penyediaan Bahan/Material	Hajimena	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	12 Paket	109,775,600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	60,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	60,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157 Laporan	3,119,689,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hajimena	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157 Laporan	1,976,457,600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hajimena	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12,997,600	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hajimena	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12,997,600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	100%	1,096,324,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	100%	1,246,324,500	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hajimena	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hajimena	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Hajimena	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	Pengadaan Mebel	Hajimena	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hajimena	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	934,246,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hajimena	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	1,070,246,500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hajimena	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	102,078,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hajimena	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	102,078,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,246,216,100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,324,216,100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hajimena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	642,940,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hajimena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	642,940,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hajimena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	603,276,100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hajimena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	681,276,100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hajimena	Persentase kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	100%	540,669,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hajimena	Persentase kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	100%	540,669,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hajimena	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	173,484,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hajimena	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	173,484,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hajimena	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	550 Unit	151,170,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hajimena	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	550 Unit	151,170,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hajimena	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	216,015,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hajimena	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	216,015,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	100%	13,604,995,600	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	100%	10,992,978,600	
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Peserta yang lulus Pengembangan Kompetensi teknis dengan hasil pos tes di atas 70	100%	1,721,171,500	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Peserta yang lulus Pengembangan Kompetensi teknis dengan hasil pos tes di atas 70	100%	2,501,171,500	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Hajimena	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	780 Orang	1,721,171,500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Hajimena	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	940 Orang	2,501,171,500	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase pemenuhan penyelenggaraan sertifikasi, dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang sesuai standar	100%	11,883,824,100	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase pemenuhan penyelenggaraan sertifikasi, dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang sesuai standar	100%	8,491,807,100	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Hajimena	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Lembaga	43,747,900	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Hajimena	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Lembaga	43,747,900	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ Kota	Hajimena	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	400 orang	184,690,100	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ Kota	Hajimena	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	400 orang	184,690,100	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Hajimena	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	4 Laporan	194,813,600	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Hajimena	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	4 Laporan	194,813,600	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Hajimena	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	3 Dokumen	35,300,000	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Hajimena	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	3 Dokumen	35,300,000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Hajimena	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1449 Orang	11,307,592,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Hajimena	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	938 Orang	7,915,575,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	Hajimena	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Dokumen	117,680,000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	Hajimena	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Dokumen	117,680,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

BPSDM Provinsi Lampung dalam penyusunan program kegiatan, memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur yang termuat dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD. Apabila terdapat Pokir DPRD yang masuk dalam kewenangan tugas fungsi BPSDM maka BPSDM Provinsi Lampung perlu mengakomodir Pokir tersebut dalam Renja 2023.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ketiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Tinjauan telaahan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional terkait pembangunan SDM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, maupun yang dirumuskan dalam RKP 2022 (rancangan awal) serta kebijakan pengembangan SDM ditingkat instansi pembina baik LAN RI maupun BPSDM Kemendagri. Identifikasi kebijakan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional Bidang SDM

No.	Kebijakan Nasional
1	RPJP 2025-2025
	a Pembangunan Sumber Daya Manusia
2	RPJMN 2020-2024
	a Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
	b Birokrasi kelas dunia
3	Ranwal RKP 2023 (BAPPENAS)
	a peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
4	LAN RI
	a Peningkatan kualitas manajemen ASN
5	BPSDM Kemendagri
	a Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kebijakan pembangunan SDM baik aparatur dan non aparatur merupakan salah satu bagian penting dari proses pembangunan nasional secara keseluruhan, dimana pembangunan tersebut dapat berjalan dan berdaya guna apabila SDM sebagai daya ungkit juga dibangun dari segi kualitas dan manajemen pengelolaannya (pemetaan SDM, pengembangan kompetensi dan uji kompetensi). Pembangunan SDM aparatur juga harus mendukung visi misi daerah dan tujuan sasaran organisasi perangkat daerah, untuk itu pengembangan kompetensi diarahkan untuk mendukung janji/agenda kerja Kepala Daerah yang telah disusun khususnya dalam rangka terwujudnya *good governance*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, dimana pada penyusunan Renja 3ini, BPSDM Provinsi Lampung mengacu pada Renstra tahun 2019 - 2024. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah : **“Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Efektif.”**

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat

Tujuan dan sasaran Renja BPSDM Provinsi Lampung tahun 2022 sudah selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Matriks keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra dan Renja dapat dilihat dibawah ini:

URAIAN	RENSTRA	RENJA
TUJUAN	Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Efektif	Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Efektif
SASARAN	1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara operasional, program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung harus mendukung tercapainya tujuan dan arah pembangunan Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024. BPSDM Provinsi Lampung beserta OPD lainnya memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi sesuai dengan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2023 direncanakan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengembangan kompetensi SDM aparatur dan non aparatur di Provinsi Lampung, serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara BPSDM Provinsi Lampung sendiri, peningkatan mutu kualitas penyelenggaraan diklat dan sarana prasarana penunjang serta sinergi dengan janji/agenda kerja Gubernur Lampung yaitu: Mendukung Agenda Kerja Utama: Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi

Pada tahun 2023, program yang direncanakan berjumlah sebanyak 2 (dua) buah sedangkan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sub kegiatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah yang pelaksanaannya berlokasi di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung atau Hajimena. Dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp.30.094.405.992,-**. Penggambaran lebih lanjut program dan kegiatan tahun 2023 beserta kebutuhan anggaran disajikan pada Matriks Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana terlampir.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Daerah Provinsi Lampung

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi (Kab/Kota /Kec /Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	19,056,427,392			100%	22,146,915,540	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	155,780,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	162,011,200	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hajimena	18 Dokumen	100,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	18 Dokumen	104,000,000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hajimena	8 Laporan	33,280,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	8 Laporan	34,611,200	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hajimena	20 Laporan	22,500,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	20 Laporan	23,400,000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13,163,750,292	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	13,660,373,683	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hajimena	85 Orang	13,088,750,292	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	85 Orang	13,606,293,683	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hajimena	1 Laporan	47,952,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	1 Laporan	32,448,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi (Kab/Kota /Kec /Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Hajimena	18 Laporan	27,048,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	18 Laporan	21,632,000	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Barang Milik daerah Perangkat Daerah		100%	28,990,500	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	33,320,000	
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hajimena	3 Laporan	15,670,500	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	3 Laporan	20,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hajimena	1 Laporan	13,320,000			1 Laporan	13,320,000	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	280,085,400	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	317,500,000	
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	Hajimena	9 Dokumen	52,878,500	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	9 Dokumen	37,500,000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Hajimena	105 orang	227,206,900	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	110 orang	280,000,000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2,316,611,600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	3,365,490,017	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hajimena	12 Paket	36,484,200	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Paket	65,000,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi (Kab/Kota /Kec /Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Hajimena	12 Paket	55,175,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Paket	71,400,000	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Hajimena	12 Paket	10,367,600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Paket	37,500,000	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Hajimena	12 Paket	35,354,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Paket	55,000,000	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan yang Disediakan	Hajimena	200 Dokumen	20,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	200 Dokumen	25,000,000	
	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Hajimena	12 Paket	109,775,600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Paket	130,000,000	
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hajimena	8 Laporan	60,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	8 Laporan	70,000,000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hajimena	157 Laporan	1,976,457,600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	162 Laporan	2,893,590,017	
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hajimena	12 Dokumen	12,997,600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Dokumen	18,000,000	
	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	Persentase kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan		100%	1,246,324,500		Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	2,426,811,240	
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Hajimena	1 Paket	74,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	2 Paket	390,000,000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hajimena	100 unit	1,070,246,500	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	150 unit	1,111,811,240	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Hajimena	1 unit	102,078,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	1 unit	925,000,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi (Kab/Kota /Kec /Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,324,216,100		Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	1,291,600,000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hajimena	12 Laporan	642,940,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Laporan	700,000,000	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hajimena	12 Laporan	681,276,100	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	12 Laporan	591,600,000	
	8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan		100%	540,669,000		Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	889,809,400	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hajimena	7 Unit	173,484,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	6 Unit	150,309,400	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hajimena	550 Unit	151,170,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	560 Unit	210,000,000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Hajimena	30 Unit	216,015,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	30 Unit	529,500,000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan		100%	10,992,978,600		Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	15,494,360,000	Mendukung Agenda Kerja Utama: Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
	1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Peserta yang lulus Pengembangan Kompetensi teknis dengan hasil pos tes di atas 70 dan nilai memuaskan		100%	2,501,171,500		Kegiatan Lanjutan/ Rutin	100%	3,171,000,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi (Kab/Kota /Kec /Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hajimena	940 Orang	2,501,171,500	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	1063 Orang	3,171,000,000	Mendukung Agenda Kerja Utama: Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
1	Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sertifikasi, dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang sesuai standar		100%	8,491,807,100	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin		12,323,360,000	
	- Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Hajimena	1 Lembaga	43,747,900	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	1 Lembaga	50,000,000	
	- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Hajimena	100 orang	184,690,100	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	450 orang	815,000,000	
	- Pengelolaan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Hajimena	4 Laporan	194,813,600	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	5 Laporan	200,000,000	
	- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Hajimena	3 Dokumen	35,300,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	4 Dokumen	25,000,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (kegiatan lanjutan/ alternatif/baru, atau keterangan lainnya)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi (Kab/Kota /Kec /Desa/Kel)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Hajimena	938 Orang	7,915,575,500	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	1530 Orang	11,117,840,000	Mendukung Agenda Kerja Utama: Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
	- Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Hajimena	6 Dokumen	117,680,000	APBD	Kegiatan Lanjutan/ Rutin	6 Dokumen	115,520,000	
TOTAL						30,049,405,992			37,641,275,540	

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



BAB IV.

RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BPSDM tahun 2019-2024, dan juga mengacu kepada rancangan awal RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu strategis dan kebijakan nasional. Renja BPSDM tahun 2023 memuat 2 (dua) program sedangkan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) buah dan sub kegiatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah sebagaimana telah dijelaskan pada bab III dengan pendanaan yang bersumber dari APBD BPSDM Provinsi Lampung dan setoran diklat kabupaten/kota yang masuk sebagai pendapatan BPSDM yang tercatat kedalam rekening Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024, untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dan dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder pengembangan SDM dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Dengan adanya rencana kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran perangkat daerah diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup pemerintah Provinsi Lampung maupun dengan pemerintah Kabupaten/Kota, serta dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



YURNALIS, S. IP., M.Si
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
NIP. 19690710 199003 1 006